

REPRESENTASI ANAK WUNGŚU SEBAGAI PENGUASA KERAJAAN BALI KUNO

Hedwi Prihatmoko¹, Wanny Rahardjo Wahyudi¹

¹Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
hedwi.prihatmoko@gmail.com

Abstract, Representation of Anak Wungśu as the Ruler of the Ancient Balinese Kingdom. Representation is the process by which cultural agents use language, in a broad sense, to produce meaning, while meaning is created to represent a concept. Ancient Indonesian kings, including ancient Balinese kings, also engaged in the production of meaning to represent themselves, one of which was through inscriptions. King Anak Wungśu had a distinct portrayal as a king compared to his predecessors, particularly in the title used to address him. Nevertheless, the representation of an ideal king remained constructed around the figure of Anak Wungśu. There are three aspects to consider regarding the process of meaning production in Anak Wungśu's inscriptions, namely the world of things, the conceptual world, and the signs. The data used are transcriptions of old Balinese inscriptions, research findings, and other scientific works related to epigraphy. Analysis was done by sorting, grouping, and translating the information within the inscriptions to provide an overview of the world of things, the conceptual world, and signs. The study in this article indicates that the representation of the ideal king of Anak Wungśu was constructed based on the concept of *aṣṭabrata* and his self-association with gods. The representation of this ideal king was also built through his policies as a manifestation of applying *aṣṭabrata* during his reign.

Keywords: Inscription, Bali, Ancient History, Representation, Anak Wungśu, Ideal King, *Aṣṭabrata*.

Abstrak, Representasi adalah proses ketika pelaku budaya menggunakan bahasa, dalam arti yang luas, untuk memproduksi makna, sedangkan makna diproduksi untuk mewakili suatu konsep. Raja-raja pada masa Indonesia Kuno, termasuk raja Bali Kuno, juga melakukan produksi makna untuk merepresentasikan dirinya, salah satunya melalui prasasti. Raja Anak Wungśu memiliki penggambaran yang berbeda sebagai seorang raja jika dibandingkan dengan raja-raja pendahulunya, terutama dalam penyebutan gelarnya. Kendati demikian, representasi sebagai raja ideal masih tetap terbangun pada sosok Anak Wungśu. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan terkait proses produksi makna di dalam prasasti Raja Anak Wungśu, yaitu dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda. Data yang digunakan berupa transkripsi-transkripsi prasasti Bali kuno, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan bidang epigrafi. Analisis berupa pemilahan, pengelompokan, dan penerjemahan keterangan-keterangan dalam prasasti dilakukan untuk memberikan gambaran terkait dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda. Kajian dalam artikel ini menunjukkan bahwa representasi raja ideal dari Anak Wungśu dibangun berdasarkan konsep *aṣṭabrata* dan pengasosiasian diri dengan dewa. Representasi raja ideal itu dibangun juga melalui kebijakan-kebijakannya sebagai bentuk penerapan *aṣṭabrata* di dalam kehidupan bernegara.

Kata kunci: Prasasti, Bali, Sejarah Kuno, Representasi, Anak Wungśu, Raja Ideal, *Aṣṭabrata*.

1. Pendahuluan

Representasi adalah proses ketika para pelaku budaya menggunakan bahasa (secara luas didefinisikan sebagai sistem apa pun yang menggunakan tanda, sistem penanda apa pun) untuk memproduksi makna. Definisi ini membawa premis penting bahwa semua hal (objek, manusia, kejadian di dunia) tidak memiliki makna pasti atau makna yang sebenarnya di dalam dirinya.

Manusia (di masyarakat dan di antara sistem kebudayaan manusia) adalah aktor yang membuat suatu hal bermakna. Dengan kata lain, manusia adalah “yang menandakan” (Hall 1997, 61). Dalam proses produksi makna ini, terdapat tiga pendekatan dalam representasi, yaitu pendekatan reflektif, intensional, dan konstruksionis. Dalam pendekatan reflektif, makna dianggap terletak



pada objek, manusia, ide atau peristiwa di dunia nyata, dan bahasa yang berfungsi seperti cermin, yaitu untuk merefleksikan makna sebenarnya sebagaimana yang sudah ada di dunia nyata. Dalam pendekatan intensional, pembicara atau penulis adalah mereka yang mengenakan makna tertentu kepada dunia melalui bahasa. Bahasa merupakan apa yang penulis kehendaki sesuai dengan yang mereka maksudkan. Pendekatan ketiga, yaitu pendekatan konstruksionis, mencoba untuk mengenali karakter sosial dari bahasa. Dalam pendekatan konstruksionis, makna dibangun atau dikonstruksi melalui sistem bahasa atau sistem apa pun yang digunakan untuk mewakili suatu konsep. Pelaku atau aktor sosial menggunakan sistem konseptual budaya mereka, sistem linguistik, dan representasi lainnya untuk membangun makna, membuat dunia bermakna, dan mengkomunikasikan tentang dunia tersebut secara bermakna kepada orang lain (Hall 1997, 24–25).

Proses produksi makna ini dilakukan juga oleh penguasa dalam merepresentasikan dirinya. Salah satu bentuk produksi maknanya adalah representasi melalui pemakaian nama gelar. Penulisan gelar raja ini bermacam-macam, yaitu dapat mengandung gelar yang diikuti toponim, *garbhaprasūtināma* atau *garbhajanmanāma* (nama kecil), gelar penobatan (*abhiṣeka*), dan garis keturunan atau nama dinasti (Boechari 2012d, 470; Ramadhana 2016, 6). Nama *abhiṣeka* biasanya memberikan gambaran bahwa raja dianggap sebagai inkarnasi dari dewa tertentu atau sifat ideal yang dianggap sebagai panutannya (Boechari 2012b, 219; Tejawasono 2003, 103). Fenomena demikian terjadi juga pada raja-raja pada masa Bali Kuno. Penyebutan raja dalam prasasti Bali Kuno baru muncul pertama kali dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Śrī Kesarī pada tahun 835 Śaka. Raja ini menerbitkan empat prasasti yang semuanya berupa *jayastambha* dan dipahatkan pada batu, yaitu prasasti Blanjong, Panempahan, Malat Gede, dan Pukuh (Stutterheim 1934, 126–32; Goris 1954, 64–65; Atmodjo 1992, 151; Sunarya dkk. 2019, 90–91). Raja-raja yang memerintah setelah kekuasaan Śrī Kesarī adalah sebagai berikut:

- Sang Ratu Śrī Ugrasena. Sang Ratu Śrī Ugrasena memerintah setidaknya dari tahun (839 Śaka sampai 858 Śaka) (Goris 1954, 8–10; Damais 1960, 155);
- Sang Ratu Śrī Aji Taganendra Dharmmadewa bersama dengan permaisurinya Sang Ratu Luhur Śrī Subhadrika Dharmmadewī (877 Śaka sampai 889 Śaka). Perlu menjadi catatan bahwa pembacaan nama Taganendra Dharmmadewa seringkali dibaca Tabanendra Warmmadewa (Damais 1952, 84–85; Goris 1954, 11–12; 1965, 16), sedangkan nama Dharmmadewi milik Subhadrika kadang-kadang dibaca Warmmadewi (Damais 1952, 84–85; Goris 1954, 11–12). Pembacaan ulang prasasti-prasasti yang dikeluarkan olehnya menunjukkan adanya kesalahan pembacaan oleh sarjana-sarjana terdahulu;
- Sang Ratu (Śrī) [–]Jayasingha Warmmadewa (882 Śaka). Penyebutan nama raja ini tidak lengkap, dan hanya terdapat dalam prasasti Manukaya yang berbahan batu. Bagian prasasti yang menyebutkan nama raja berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga penyebutan lengkap nama rajanya sulit diidentifikasi. Sebelumnya, Stutterheim (1929, 68) membaca nama rajanya adalah Candrabhaya(s) inghawarmmadewaḥ. Damais (1955, 225) kemudian melakukan pembacaan ulang dan mengoreksi pembacaannya menjadi: “[–]w[–]ndrajayasīṅha warmmadewa”. Goris (1965, 18) memperkirakan bagian yang tidak terbaca tersebut adalah “[–]w(e)ndra jayasingha warmmadewa”;
- Sang Ratu Śrī Janasādhu Warmmadewa (897 Śaka) (Goris 1954, 13);
- Śrī Mahārāja Śrī Wījaya Mahādewī (905 Śaka) (Goris 1954, 13; van Stein Callenfels 1926, 2);
- Sang Ratu Luhur Śrī Guṇapriyadharmmapatni (kadang dituliskan Śrī Giṇapriyadharmmapatni) dan Sang Ratu Maruhani Śrī Dharmmodayana Warmmadewa (911 Śaka sampai 925 Śaka) (Goris 1954, 13–14);

- Pāduka Haji Śrī Dharmmodayana Warmmadewa (933 Śaka) (Goris 1954, 14);
- Sang Ratu Śrī Sang Ājñādwī (938 Śaka) (Goris 1954, 15); dan
- Pāduka Haji Śrī Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa (944 Śaka sampai 947 (Śaka) (Goris 1954, 15–16; Ekawana, Atmodjo, dan Suhadi 1990, 8; Sumerata 2022, 11).

Raja Anak Wungsu merupakan raja Bali Kuno yang memerintah setelah Pāduka Haji Śrī Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa. Raja ini memerintah paling lama jika dibandingkan dengan raja-raja Bali Kuno lainnya. Berdasarkan data prasasti, rentang masa pemerintahan Raja Anak Wungśu paling tidak dari 971 Śaka (prasasti Trunyan AII) sampai 1000 Śaka (prasasti Munduktemu III) (Goris 1954, 17–18; Prihatmoko dkk. 2020), sehingga Raja Anak Wungsu setidaknya memerintah selama 29 tahun. Selain memerintah paling lama, Raja Anak Wungśu juga merupakan raja Bali Kuno kedua yang paling banyak mengeluarkan prasasti, yaitu tidak kurang dari 28 prasasti, setelah Raja Jayapangus yang mengeluarkan sekitar 43 prasasti (Hardiati 2010, 327, 333–34).

Kendati memerintah dalam jangka panjang dan mengeluarkan banyak prasasti, penyebutan dirinya secara personal sebagai raja berbeda dengan raja-raja pendahulunya. Secara lengkap, penyebutan Raja Anak Wungśu sebagai raja di dalam prasasti adalah sebagai berikut: *pāduka haji anak wungśunira kalih bhatari sang lumah i burwan, mwan bhatara dewata sang lumah i bañu wka*. Berdasarkan penyebutannya, kata “Anak Wungśu” tersebut belum tentu merujuk kepada nama raja. Penggunaan sufiks *-nira* di belakang kata “Anak Wungśu” memunculkan kemungkinan bahwa kata “Anak Wungśu” ini belum tentu merujuk kepada nama seorang raja. Sufiks *-nira* merupakan pronomina penentu kepunyaan orang ketiga dan dapat disepadankan dengan akhiran “-nya” di dalam bahasa Indonesia (Mardiarsito dan Kridalaksana 1984, 45). Oleh karena itu, frasa *pāduka haji anak wungśunira kalih bhatari sang lumah i burwan, mwan bhatara dewata sang lumah i bañu wka* dapat diterjemahkan menjadi: ‘*paduka*

haji anak bungsunya (beliau) berdua Bhatari yang berbaring (*didharmakan*) di Burwan, dan Bhatara yang berbaring (*didharmakan*) di Banyu Wka’. Penyebutan raja yang tidak secara eksplisit menampilkan nama gelar (kecuali gelar *pāduka haji* pada bagian awal) tidak pernah dilakukan oleh raja-raja Bali Kuno sebelumnya.

Kendati Raja Anak Wungśu tidak menampilkan nama gelarnya secara eksplisit, raja ini beberapa kali mengasosiasikan dirinya dengan dewa atau sebagai penjelmaan dari *dharma* di luar dari nama atau gelarnya, seperti yang tercantum di dalam prasasti Dawan (975 Śaka), Sawan A (980 Śaka), Dausa AII (983 Śaka), dan Pandak Bandung (993 Śaka) (van der Tuuk dan Brandes 1885, 607–13; van Stein Callenfels 1926, 14; Santosa 1965, 21–36, 129–34). Pengasosiasian diri terhadap sifat kedewaan di luar nama diri atau gelar tersebut juga pertama kali dilakukan oleh Raja Anak Wungśu, dan belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya (Hardiati 2010, 365). Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Anak Wungśu digambarkan secara berbeda sebagai representasinya dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah representasi seperti apa yang terbangun dari Raja Anak Wungśu berdasarkan penggambarannya di dalam prasasti. Pembahasan mengenai pengungkapan representasi dari Raja Anak Wungśu untuk mengetahui tujuan pemerintahan yang terkait dengan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan olehnya.

Dalam konteks Raja Anak Wungśu, makna dirinya sebagai seorang penguasa atau raja dibangun melalui representasi, dengan menggunakan sistem konseptual budaya, linguistik, atau bentuk representasi lainnya. Dengan kata lain, maknanya sebagai seorang raja tidak muncul secara natural dari dalam dirinya, yang oleh Hall (1997, 55) dikatakan: “*the shift towards a constructionist conception of language and representation did a great deal to displace the subject from a privileged position in relation to knowledge and meaning*”. Artinya, pendekatan yang diambil dalam mengkaji representasi Anak Wungśu ini adalah pendekatan konstruksionis. Konsep pendekatan konstruksionis ini sejalan

dengan apa yang pernah dikatakan oleh Michel Foucault bahwa kekuasaan bukanlah merupakan suatu fenomena dominasi satu individu, kelompok, atau kelas tertentu yang terkonsolidasi dan bersifat homogen atas orang lain (Foucault 1980b, 98). Lebih lanjut menurutnya, kekuasaan tidak terlepas dari pengetahuan dan wacana (*discourse*), serta praktik diskursif (*discursive practice*) yang merupakan poin sentral dalam analisisnya, yaitu wacana adalah praktik, atau secara lebih spesifik sebagai sekumpulan praktik. Hubungan ini begitu erat sehingga Foucault mengatakan: “*the exercise of power perpetually creates knowledge and, conversely, knowledge constantly induces effects of power*” (Bacchi dan Bonham 2014, 174; Foucault 1980a, 52). Stuart Hall melihat adanya hubungan antara relasi kuasa dan praktik diskursif dengan representasi. Hall (1997, 61) menjelaskan bahwa dalam perspektif konstruksionis, representasi melibatkan produksi makna dengan pembentukan hubungan-hubungan di antara tiga susunan hal yang berbeda, yaitu:

2. Dunia realitas (*the world of things*), yang meliputi: manusia, kejadian, pengalaman;
3. Dunia konseptual (*the conceptual world*), yang meliputi: konsep mental yang dipahami; dan
4. Tanda (*the signs*), sebagai representasi makna, yang diatur ke dalam bahasa dan yang mewakili atau mengomunikasikan konsep-konsep tersebut.

Produksi makna, dalam kaitannya dengan representasi, tergantung pada praktik interpretasi, dan interpretasi ditopang oleh manusia yang secara aktif menggunakan tanda, melalui proses *encoding-decoding*. Proses *encoding* adalah menempatkan hal-hal ke dalam suatu kode atau tanda, dan pihak penerima pesan kemudian menginterpretasikan atau melakukan proses *decoding* ke dalam makna. Namun, makna selalu berubah, sehingga tanda beroperasi lebih seperti konvensi sosial daripada sebagai suatu hukum tetap atau aturan yang tidak bisa dilanggar (Hall 1997, 62). Kode dari proses *encoding* dan *decoding* mungkin tidak simetris secara sempurna. Derajat simetri, yaitu derajat “pemahaman” dan “kesalahpahaman” dalam pertukaran komunikatif, tergantung pada

hubungan kesetaraan yang dibangun di antara posisi pembuat pesan dan penerima pesan, yaitu simetri–tidak simetrinya struktur pemahaman terkait penggunaan kode oleh pembuat pesan dan penerima pesan pada saat transformasi ke dalam dan ke luar bentuk diskursif. Suatu hal yang disebut sebagai distorsi atau kesalahpahaman justru muncul dari kurangnya kesetaraan antara kedua belah pihak dalam pertukaran komunikatif (Hall 1980, 119–20).

2. Metode

Pengumpulan data dalam artikel ini diperoleh dari transkripsi prasasti yang diterbitkan selama masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Data prasasti yang digunakan adalah prasasti-prasasti yang menyebutkan nama Anak Wungsu sebanyak 17 prasasti dan 2 prasasti yang tidak menyebutkan nama Anak Wungsu, tetapi diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Anak Wungsu berdasarkan penyebutan nama-nama pejabatnya. Kesembilan belas prasasti tersebut yang dijadikan data adalah prasasti Trunyan AII, Bebetin AIII, Dawan, Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sawan B, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, Manikliu BII, Pandak Bandung, Klungkung A, Bila II, Kayubihi, Munduktemu III, Ubung A, dan Sukawati A. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran literatur, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan prasasti-prasasti yang diterbitkan selama pemerintahan Raja Anak Wungsu.

Tahap analisis diawali dengan pemilahan dan pengelompokan data, serta penerjemahan. Penerjemahan dilakukan dengan menggunakan *Kamus Jawa Kuna – Indonesia* (Zoetmulder dan Robson 2006), *woordregister* (daftar kata) yang disusun oleh Roelof Goris (Goris 1954, 205–339), dan *A Sanskrit-English Dictionary* (Monier-Williams 1899). Proses penerjemahan juga memerlukan pemahaman atas struktur tata bahasa Jawa Kuno. Acuan yang dipakai dalam memahami struktur tata bahasa Jawa Kuno dalam artikel ini adalah *Bahasa Parwa: Tata Bahasa Jawa Kuna I (Bentuk Kata)* dan *II (Bentuk Kalimat)* (Zoetmulder dan Poedjawijatna

1992; 1993) dan *Struktur Bahasa Jawa Kuna* (Mardiwarsito dan Kridalaksana 1984).

Data yang digunakan berupa keterangan-keterangan dalam prasasti yang dapat memberi gambaran tentang dunia realitas (*world of things*), dunia konseptual (*the conceptual world*), dan tanda (*the signs*) sebagai representasi dalam produksi makna. Makna dibangun dengan menggunakan pembentukan hubungan di antara tiga aspek tersebut (dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda) melalui proses *encoding-decoding*. Dalam kajian ini, hal yang termasuk dunia realitas (*the world of things*) adalah peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian, dunia konseptual (*the conceptual world*) meliputi konsep pemikiran yang melatarbelakangi proses produksi makna, sedangkan analisis terhadap tanda (*the signs*) dilakukan berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai representasi dari raja. Hall (1980, 120) menggambarkan skema proses *encoding/decoding* ini seperti pada gambar 1.

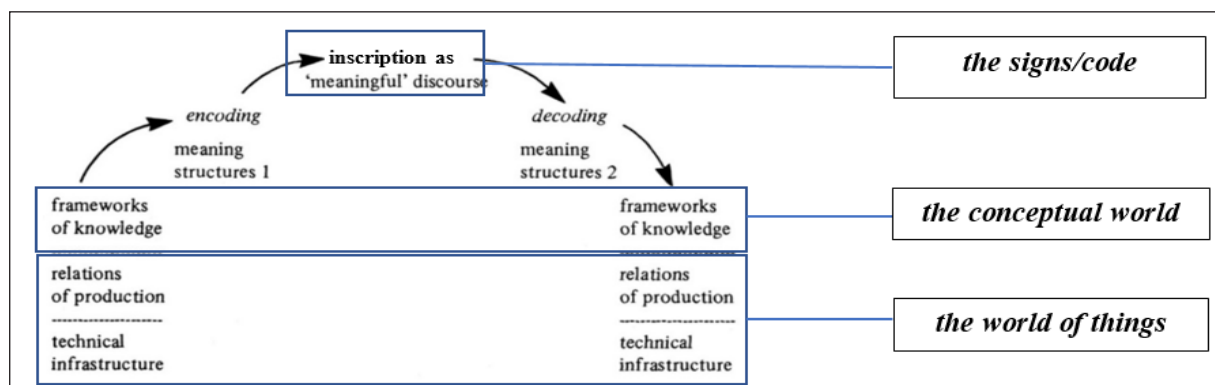
Kemudian, penafsiran data dilakukan dengan menempatkan hasil analisis ke dalam konteks sejarah Bali Kuno untuk menjelaskan tujuan produksi makna yang menggunakan tanda sebagai representasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti uraian sebelumnya, proses produksi makna sebagai representasi perlu untuk mempertimbangkan hubungan dari aspek-aspek dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda.

Dunia realitas meliputi peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Penerbitan prasasti-prasasti Bali Kuno sebagian besar berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa penetapan prasasti biasanya meliputi: raja atau pejabat yang menetapkan prasasti, masyarakat yang membuat permohonan atau menerima anugerah, pejabat perantara, dan pejabat yang ikut terlibat atau hadir dalam peristiwa penetapan prasasti. Keempat elemen kelompok tersebut bisa saja terlibat seluruhnya dalam peristiwa penetapan prasasti, atau hanya sebagian saja yang terlibat.

Kontak dengan budaya India berpengaruh terhadap munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara sejak abad ke-4–5. Meskipun hal-hal yang terkait bagaimana kerajaan di Nusantara mengadopsi institusi kerajaan dari India belum diketahui secara pasti, gambaran sekilas mengenai cita-cita kerajaan pada masa Hindu-Buddha dapat terlihat dalam Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno. Melalui kakawin ini, terdapat gambaran tentang bagaimana seorang raja yang baik harus memerintah kerajaan dan rakyatnya (Boechari 2012b, 217–18). Poerbatjaraka (1926, 271) memperkirakan bahwa Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno ditulis sekitar masa pemerintahan Balitung (898–910), yaitu sekitar akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Kesimpulan Poerbatjaraka tersebut didasarkan pada metrum, fitur pola irama dan bunyi yang digunakan dalam kakawin, daftar pejabat desa yang sesuai dengan prasasti-prasasti dari periode



Gambar 1. Proses *Encoding/Decoding* Pesan (Sumber: diolah dari Hall 1980, 120)

Jawa Tengah yang berbeda dengan yang ada di Jawa Timur, dan deskripsi kompleks candi yang ada dalam kakawin yang sesuai dengan komposisi monumen Hindu Jawa dari periode Jawa Tengah (de Casparis 1956, 287), yang dalam hal ini adalah Candi Prambanan. Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno memang tidak disebutkan secara eksplisit penggunaannya di dalam prasasti Bali Kuno, tetapi kronologi teks ini dianggap masih relevan dengan konteks masa pemerintahan Raja Anak Wungsu yang berlangsung pada abad ke-11 (1049–1078 Masehi). Selain itu, kerajaan Bali Kuno pada masa tersebut juga sudah mengalami pengaruh Jawa Kuno yang cukup kuat. Oleh karena itu, Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno digunakan sebagai latar belakang konseptual dalam menjelaskan pemikiran atas gambaran raja yang ideal (sebagai landasan dunia konseptual).

Sebenarnya, beberapa prasasti Bali Kuno yang terbit pada akhir abad ke-11 sampai ke-14 menyebutkan sejumlah kitab yang menjadi dasar hukum pembuatan keputusan di dalam prasasti. Penyebutan sejumlah kitab hukum tersebut muncul dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Śakāleṇḍu (1088–1101), Śurādhipa (1115–1119), Jayaśakti (1133–1150), Rāgajāya (1155), Jayapangus (1177–1181), dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru (1324–1325). Kitab hukum yang digunakan pada masa Raja Śakāleṇḍu adalah *Uttara Widhi Balawan*, masa Śurādhipa adalah *Rājawacana*, serta masa Jayaśakti adalah *Rājawacana* dan *Āgama*. Kemudian, Raja Rāgajāya menggunakan kitab *Uttara Widhi Balawan* dan *Rājawacana*. Adapun, Raja Jayapangus menggunakan kitab *Manawakamandaka* (kadang-kadang ditulis *Manawāśasanadharmā*), *Smṛtti*, *Daśasila*, dan *Pañcaśikṣa*, sedangkan Raja Bhaṭāra Śrī Mahāguru menggunakan kitab *Mānawā Sanghyang Kāmāṇḍakā*, *Daśasila*, dan *Pañcaśikṣa* (Astra 1997, 181–97, 219). Sayangnya, prasasti-prasasti yang diterbitkan sebelum masa pemerintahan raja-raja tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan kitab-kitab hukum sebagai dasar hukum pembuatan keputusan di dalam prasasti.

Sebelumnya pada bagian awal pendahuluan, artikel ini telah mengemukakan bahwa representasi merupakan proses ketika para pelaku budaya menggunakan bahasa, yaitu sistem apa pun yang menggunakan tanda atau sistem penanda untuk memproduksi makna. Dengan kata lain, dalam pengertian yang luas, prasasti dapat dikatakan sebagai representasi dari raja itu sendiri. Hal ini disebabkan karena prasasti mengandung tanda yang berfungsi untuk mengomunikasikan suatu makna kepada penerima pesan. Tanda tersebut merupakan unsur-unsur prasasti yang menunjukkan adanya proses produksi makna, yang kemudian terbentuk dalam ungkapan, simbolisasi, narasi, dan lain-lain, sebagai representasi terhadap raja. Secara lebih detail, tiga aspek berupa dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Dunia Realitas

Dalam dunia realitas (*the world of things*), terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Secara umum, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan penerbitan prasasti pada masa Bali Kuno berkaitan dengan:

1. Peristiwa yang berkenaan dengan prasasti, yaitu permintaan agar prasasti yang sebelumnya dituliskan pada lontar (*ripta*) untuk dituliskan kembali pada tembaga (*tāmraprasasti*);
2. Peristiwa yang berkenaan dengan *ḍṛwyahaji* (pajak, cukai, iuran, dan semacamnya) serta *laku langkah* atau *buñcang haji* (kerja bakti atau gotong royong);
3. Peristiwa yang berkenaan dengan wilayah desa, seperti: (a) pemberian status *sīma* kepada desa atau wilayah tertentu, (b) permohonan untuk memperluas wilayah desanya, (c) permohonan agar raja menentukan batas-batas wilayah desanya karena ada perselisihan kewilayahan dengan desa tetangganya, (d) permohonan penduduk desa agar desanya dapat terlepas dari pemerintahan desa lain dan dapat menjadi desa yang berdiri sendiri, dan (e) laporan kepada raja bahwa terdapat kekacauan di

wilayah desanya (Goris 1948, 15; Astra 2008, 744–46).

Pada masa pemerintahan Raja Anak Wungŕu, peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi penerbitan suatu prasasti biasanya terkait dengan permohonan untuk menulis prasasti pada tembaga yang sebelumnya ditulis pada lontar, penyesuaian *drwyahaji* dan *laku langkah* atau *buñcang haji*, dan pemberian status *sīma* kepada wilayah tertentu. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah selama pemerintahan Anak Wungŕu, raja ini banyak membuat penetapan ulang terhadap prasasti-prasasti yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja sebelumnya. Setidaknya terdapat 11 prasasti yang pernah dikeluarkan oleh raja sebelumnya, kemudian ditetapkan ulang oleh Raja Anak Wungŕu. Prasasti-prasasti tersebut adalah prasasti Trunyan AII, Bebetin AIII, Sukawana AII, Batunya AII, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, Manikliu BII, Bila II, dan Munduktemu III. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya penetapan atau penetapan ulang prasasti pada masa pemerintahan Raja Anak Wungŕu dijabarkan secara lebih detail pada tabel 1 berikut.

Sementara itu, bagian *sambandha* dari prasasti Sukawati A hilang sehingga peristiwa apa yang melatarbelakangi penetapan prasasti belum bisa dipastikan. Bagian yang menyebutkan nama wilayah dalam prasasti Sukawati A juga hilang, tetapi nama “*karāmān i sukawati*” ditemukan juga dalam prasasti Batuan (944 Śaka), sehingga nama wilayah Sukawati sudah ada sejak dulu. Selain itu, penyebutan batas-batas desa dalam prasasti Sukawati A tidak hilang dan beberapa toponim yang disebutkan masih dapat dilacak, seperti “*bañu pathanu*”, “*bañu hos*”, dan “*sakar*” (sekarang menjadi Desa Sakah), dan berada di sekitar wilayah Desa Sukawati saat ini (Goris 1954, 98; Santosa 1965, 176). Berdasarkan data tersebut, setidaknya tidak kurang dari 19 wilayah mendapatkan perhatian Raja Anak Wungŕu berupa pemberian anugerah prasasti. Meskipun tidak semua wilayah yang mendapatkan anugerah prasasti tersebut dapat terlacak keberadaannya hingga saat ini, terdapat setidaknya 9 wilayah yang bisa ditelusuri toponimnya, yaitu *karāman i turuñan sapaśuk thāni* (Desa Trunyan),

karaman i wanwa jharu sapaśuk thani (Desa Bebetin), *karāman i cintamani sapaśuk thāni* (Desa Kintamani), *karāman i batwan sapaśuk thāni* (Desa Batunya), *dharmma ing pacanigayan sapaśuk thāni* (Banjar Cenigaan, Desa Dausa), *karāman i julah sādhikāra* (Desa Julah), *karāman i bila sapaśuk thāni* (Desa Bila), *kārāman i kulutin sablah hulu kayu* (Desa Munduktemu), dan *karāmān i sukawati* (Desa Sukawati) (gambar 2). Situasi seperti inilah yang kemudian menempatkan Anak Wungŕu sebagai salah satu raja Bali Kuno yang paling banyak menerbitkan prasasti, setelah Raja Jayapangus. Artinya, Raja Anak Wungŕu banyak turun tangan untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di wilayah kerajaannya. Banyaknya keputusan raja terdahulu yang ditetapkan ulang oleh Raja Anak Wungŕu juga menunjukkan bahwa ia memberikan perhatian besar terhadap perbaikan sistem hukum yang berlaku di wilayah kerajaannya, mengingat lebih dari setengah prasasti yang dikeluarkan oleh Anak Wungŕu merupakan penetapan ulang dari keputusan raja terdahulu. Perhatian tersebut tercermin juga dari beberapa wilayah yang diberikan anugerah status *sīma* oleh raja. Hal ini terkait juga dengan gambaran ideal seorang raja dalam konsep *aṣṭabrata* yang tertulis di Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno.

Selain peristiwa, dunia realitas juga memberikan perhatian terhadap orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam peristiwa penetapan prasasti biasanya meliputi: (1) orang, kelompok, atau masyarakat yang membuat permohonan atau menerima anugerah, (2) raja atau pejabat yang membuat ketetapan, (3) pihak perantara, dan (4) pejabat kerajaan yang turut terlibat atau hadir dalam penetapan prasasti. Secara lebih rinci, keempat elemen kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam prasasti-prasasti Bali Kuno yang dikeluarkan Raja Anak Wungŕu, pemohon atau penerima anugerah raja bisa berasal dari penduduk desa (*karāman, tanaya(n) thani, anak thāni*) melalui perwakilan dari desanya atau kelompok tertentu, seperti *mabwat haji, puruśākāra*, dan lain-lain (lihat tabel 1). Penduduk desa atau kelompok

Tabel 1. Peristiwa yang Melatarbelakangi Penetapan Prasasti (Sumber: van der Tuuk dan Brandes 1885; Brandes 1890; van Stein Callenfels 1926; Santosa 1965; Ekawana dan Jaya 1987; Sumerata 2022)

Prasasti	Tahun	Penerima Anugerah	Masalah	No
Trunyan AII	971	karāman i turuñan sapaśuk thāni	agar meneguhkan isi prasasti yang terdahulu menjadi tembaga sebab telah rusak <i>ripta</i> -nya; prasasti penetapan ulang	1
Bebetin AIII	972	karaman i wanwa jharu sapaśuk thani	ingin menambahkan isi prasastinya; masyarakat mengeluhkan karena <i>kuṭa</i> -nya berada dalam keadaan yang buruk (rusak) dan tidak lagi diperhatikan; prasasti penetapan ulang	2
Dawan	975	karāman i lutungan sapaśuk thāni	penetapan sawah di Tabaran yang termasuk ke dalam wilayah Desa Lutungan sebagai <i>jātaka</i> bagi <i>bhaṭāra</i> di <i>āntakuñjarapāda</i>	3a
Sukawana AII	976	karāman i cintamani sapaśuk thāni	agar prasastinya ditulis kembali pada tembaga karena lontarnya telah rusak; prasasti penetapan ulang	1
Batunya AII	977	karāman i batwan sapaśuk thāni	agar isi prasasti anugerah raja yang dicandikan di <i>Baṅu Madatu</i> dikukuhkan kembali dan ditulis di tembaga; prasasti penetapan ulang	1
Sawan A	980	karāman i sukha-pura sapañēmbahan sapaśuk thāni, pratyekanya, i harangan, mwang i gurguran, i bangli	penduduk desa merasa kesusahan dengan ulah <i>cakṣu paracakṣu</i> yang berlaku sewenang-wenang atas pungutan <i>ḍṛwya haji</i> , sehingga penduduk meminta peninjauan kembali dan keringanan atas <i>ḍṛwya haji</i> yang ditentukan	2
Dausa AII	983	dharmma ing pacan-igayan sapaśuk thāni	agar semua kewajiban dan hak penduduk yang berkenaan dengan pemeliharaan bangunan suci dituliskan pada tembaga, sekaligus memohon juga agar diperkenankan untuk tidak lagi memuja <i>bhaṭāra maṅḍul</i> di <i>Sukhawana</i> karena mereka juga berkewajiban memuja <i>bhaṭāra</i> di <i>Bukit Humintang</i> yang ada di desanya; prasasti penetapan ulang	1, 2
Sawan B	987	hulu kayuñjalan gurguran	permohonan untuk meninjau kembali kewajiban penduduk desa karena mereka merasa keberatan dengan kewajiban yang saat itu berlaku	2
Sembiran AIV	987	karāman i julah sādhikāra	agar menuliskan isi prasastinya di tembaga, dan menetapkan ulang isi prasasti sebelumnya; prasasti penetapan ulang	1
Serai AIII	989	mabwatthaji ri buru	pengaduan bahwa para <i>nayakan</i> dan <i>cakṣu paracakṣu</i> telah mengingkari ketetapan yang dibuat oleh paduka raja terdahulu, sekaligus permohonan agar dilakukan penyesuaian terhadap pajak atau iuran yang harus dibayarkan oleh penduduk desa; prasasti penetapan ulang	2
Pengotan AII	991	marbwatthaji ring silihan dan kuṅḍungan	permohonan agar anugerah dari raja sebelumnya yang dicandikan di <i>Baṅu Madatu</i> dituliskan ke dalam prasasti tembaga; prasasti penetapan ulang	1
Manikliu BII	(992)	angjahit kajang	permohonan dari penjahit <i>kajang</i> yang ingin memisahkan prasastinya dengan prasasti milik kelompok penjahit <i>wastra</i> , dan permohonan agar prasastinya ditembakakan; prasasti penetapan ulang	1
Pandak Bandung	993	dharmma mara-jang sapaśuk śīma punpunana sang hyang dharmma ring āntakuñjarapāda	penetapan <i>śīma</i> yang diperuntukkan bagi <i>bhaṭāra</i> di <i>āntakuñjarapāda</i> ; prasasti ini juga menyebutkan pembelian lahan untuk <i>śīma marajang punpunan sanghyang dharmma</i> di <i>āntakuñjarapāda</i> yang dilakukan oleh Raja Anak Wungśu	3a
Klungkung A	994	puruśākāra i bañu-rara	permohonan dari kelompok <i>puruśākāra</i> di Bañurara mengenai ketetapan pajak yang terkait dengan <i>kasuwakan</i> (organisasi subak) di <i>kasuwakan rawas</i>	2

Prasasti	Tahun	Penerima Anugerah	Masalah	No
Bila II	995	karāman i bila sapa-suk thāni	permohonan agar raja menulis prasasti pada tembaga yang sebelumnya dianugerahkan oleh raja yang dicandikan di Camara; disebutkan juga bahwa penduduk desa merasa kesusahan dengan ulah petugas pengawas (<i>an titir inulahulah dening cakśu</i>) yang tidak menjunjung aturan di dalam prasastinya (<i>ikang saknaknanya tapwan unggah i pangrakśayanya</i>); prasasti penetapan ulang	1, 2
Kayubihi	999	karāman i bwaḥ sapisuk thāni	permohonan agar Desa Bwaḥ ditetapkan sebagai <i>sīma</i> , yaitu untuk menjadi <i>jātaka</i> bagi <i>bhaḥāra</i> di <i>Airkanakāntarālaya</i>	3a
Munduk-temu III	1000	kārāman i kulutin sablah hulu kayu	permohonan agar menuliskan isi prasastinya di tembaga yang merupakan anugerah dari raja yang terdahulu (<i>tumambrakna pangrakśayanyānugraha nira sang atita prabhu</i>); prasasti penetapan ulang	1
Ubung A	---	karāman i halimo sapisuk thāni	---	-



Gambar 2. Sebaran Toponim Beberapa Desa Kuno dalam Prasasti Anak Wungśu
 (Sumber: diolah dari Google Earth)

tertentu tersebut biasanya diperantarai oleh pejabat perantara, tetapi terkadang ada juga yang tidak. Prasasti-prasasti yang tidak diperantarai oleh pejabat perantara, misalnya prasasti Dawan, Sukawana AII, Sawan B, Pengotan AII, Pandak Bandung, dan Klungkung A. Fungsi pejabat perantara tersebut biasanya diibaratkan sebagai *sopāna* (tangga), *mārga* (jalan), atau *larapan* (pendahuluan, pemberitahuan, petunjuk), sehingga dalam prasasti Bali Kuno, pejabat perantara ini sering dirujuk dengan istilah *makasopāna*, *makamārga*, atau *makalarapan* (Astra 2008, 742–43; Zoetmulder dan Robson

2006, s.v. “larap II, mārga, sopāna”). Pada masa Anak Wungśu, istilah yang dipakai adalah *makasopāna*, namun pejabat yang berperan sebagai *sopāna* ini tidak pasti, misalnya, ada yang berkedudukan sebagai *senāpati*, *samgat*, *rakryan amali*, atau *mpungku*. Nama-nama pejabat yang berperan sebagai *sopāna* tersebut di antaranya adalah *senāpati baḥmbunut* (Pu Jinākāra dan Pu Ammrta), *senāpati ḍinganga* (Pu Sungin dan Pu Sahaja), *senāpati mañiringin* Mapañji Jugul, *rakryān amali* Dyah Bodhisatwa, *samgat hulu wungkuk* Pu Lmbu, dan *mpungku* di suatu wilayah bernama *Bhagawanta Mahānanda*.

Dalam beberapa kasus, permasalahan yang dihadapi masyarakat begitu sulit untuk diselesaikan sehingga membutuhkan campur tangan seorang raja. Sebagai contoh, dalam prasasti Sawan A, masyarakat telah berkali-kali meminta untuk dikabulkan permohonannya karena merasa kesusahan dengan ulah petugas *cakṣu* yang mengubah-ubah ketentuan pajak, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka membuat permohonan kepada raja. Keterangan tersebut terdapat dalam kutipan berikut: “*tan lot inulahulah tkap ning cakṣu paracakṣu, parapedhitā muriḥ murihi ... kāraṇānyan panghyang anambah i lbū ni pāduka haji, tan pisan piṇḍwa, aminta tinkākēn sapanghyangnya,*” yang berarti: ‘tidak tahan (penduduk desa) diganggu oleh para petugas *cakṣu*, mereka yang sewenang-wenang mengubah-ubah ... sebabnya memohon (dan) menyembah kepada debu raja, tidak sekali dua kali, meminta disampaikan seluruh permohonannya’. Situasi serupa dialami juga oleh penduduk Desa Julah yang diterangkan dalam prasasti Sembiran AIV, yaitu: “*kāraṇānyan panambah i lbu ni pāduka haji, makasopāna sang senāpati baḷmbunut pu ammrta, tan pisan piṇḍwa aminta tinkākēn sapanghyangnya,*” yang berarti: ‘sebabnya menyembah ke debu *pāduka haji*, (yang) menjadi sebagai pejabat perantara *sang senapati baḷmbunut* Pu Ammrta, tidak sekali dua kali meminta disampaikan seluruh permohonannya’. Artinya, banyak hal yang memang membutuhkan campur tangan raja dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena raja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Bali Kuno. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan kerajaan tidak diputuskan sendiri oleh raja. Keterangan demikian dapat terlihat dalam kutipan prasasti Sembiran AIV berikut: “*matangnyan tumulwi pāduka haji makon mālapkna i taṇḍa rakryan ring pakirakiran i jro makabehan, karuhun mpungku śaiwasogata, umālocita sayathā sambhawa ni panambah nikanang karāman i julah sādhikāra,*” yang berarti: ‘itulah sebabnya kemudian raja menyuruh agar membawakan (hal ini) kepada *taṇḍa rakryan* di dewan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, yang terhormat *mpungku Śiwa-Buddha*, mempertimbangkan sesuai dengan alasan permohonan penduduk

desa di Julah sewilayah *adhikāra*’. Keterangan ini menunjukkan bahwa terdapat pejabat-pejabat tinggi yang turut membantu raja dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam prasasti. Keterlibatan pejabat tinggi dalam pembuatan kebijakan di prasasti sudah terindikasi sejak awal masa Bali Kuno.

Prasasti-prasasti awal masa Bali kuno yang terbit dari tahun 804 Śaka (Sukawana AI) sampai 835 Śaka (Munduktemu I) tidak menyebutkan nama raja di dalamnya (Goris 1954, 6–9). Kendati demikian, sistem pemerintahan kerajaan Bali kuno saat itu telah melibatkan pejabat-pejabat tinggi tertentu. Terdapat empat jabatan tinggi yang lazim disebutkan pada masa tersebut, yaitu *sarbwa*, *dinganga*, *nāyakan makarun*, dan *mañuratang ājñā*. Meskipun tidak menyebutkan nama raja, keempat pejabat tinggi tersebut mendapat titah untuk menyampaikan perintah atau ketetapan prasasti kepada seseorang/sekelompok orang/masyarakat agar melaksanakan ketetapan prasasti yang diperuntukkan bagi sekelompok orang/masyarakat wilayah tertentu.

Penyebutan nama raja dalam prasasti Bali Kuno pertama kali muncul dalam prasasti yang diterbitkan oleh Raja Kesari yang semuanya dikeluarkan pada tahun 835 Śaka. Angka tahun tersebut terbaca dalam prasasti Belanjong, Malat Gede, dan Pukuh, sedangkan angka tahun prasasti Panempahan tidak terbaca (Damais 1951, 126; 1959, 694; Atmodjo 1992, 149; Sunarya dkk. 2019, 90). Keempat prasasti Raja Kesari tersebut dipahatkan di permukaan batu padas, tetapi sayangnya tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau gambaran sistem pemerintahan raja tersebut. Kemudian pada periode 839 Śaka sampai 858 Śaka saat masa pemerintahan Raja Ugrasena, keempat jabatan tinggi *sarbwa*, *dinganga*, *nāyakan makarun*, dan *mañuratang ājñā* yang sebelumnya muncul dalam prasasti yang lebih awal kembali disebutkan. Selama masa pemerintahan Raja Ugrasena, terdapat indikasi bahwa keempat pejabat tersebut telah membantu raja dalam membuat keputusan, tetapi masa tersebut belum ada penyebutan suatu lembaga pemerintahan tingkat pusat yang membantu raja membuat kebijakan di pucuk pemerintahan (Astra 2002, 128).

Keterangan yang memberikan petunjuk terhadap keberadaan lembaga pemerintahan tingkat pusat yang membantu raja dalam membuat keputusan di pucuk pemerintahan baru muncul pada masa pemerintahan Sang Ratu Śrī Janasādhu Warmmadewa. Prasasti Sembiran AII (897 Śaka), yang dikeluarkan Raja Janasādhu, menyebutkan istilah “*samohanda senāpati di panglapwan makasupratibaddha...*”, yang berarti: ‘kumpulannya (persidangannya) (para) senapati di Panglapuan yang menetapkan...’ (Brandes 1890, 47; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “samūha, pratibaddha”; cf. Astra 2002, 129). Istilah tersebut muncul juga pada masa pemerintahan Śrī Mahārāja Śrī Wījaya Mahādewī (905 Śaka) (van Stein Callenfels 1926, 2). Kemudian pada 915 Śaka (prasasti Serai AII), yaitu pada masa pemerintahan Guṇapriyadharmmapatni dan Dharmmodayana Warmmadewa (Udayana), terdapat istilah “*samohanda senāpati ser nāyaka di pasamakṣa palapknan makasupratibaddha...*”, yang berarti: ‘kumpulannya (persidangannya) (para) *senapati, ser nāyaka* di hadapan tempat pengambilan (keputusan) yang menetapkan...’ (Goris 1954, 80–82; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “alap, samakṣa”). Istilah *pakirakirān* pertama kali muncul dalam prasasti Sading A (923 Śaka), dengan penyebutannya: “... *kasakṣyān uliḥ mpungku sogata mahaiśwara, turut sang senāpati ser nāyaka di pakirakirān makasupratibaddha...*”, yang berarti: ‘... disaksikan oleh pendeta (*mpungku*) dari kelompok Buddha dan Siwa, turut juga sang *senapati, ser nāyaka* di *pakirakirān* yang menetapkan...’ (Goris 1954, 87). Istilah *pakirakirān makasupratibaddha* kemudian menjadi *pakirakirān makabaihan* dalam prasasti Tamblingan Pura Endek AIII yang berangka tahun 925 Śaka. Sepeninggal Guṇapriyadharmmapatni, tetapi masih dalam pemerintahan Dharmmodayana Warmmadewa, istilah *pakirakirān makabaihan* berubah lagi menjadi *pakirakirān i jro makabehan*. Keterangan *pakirakirān i jro makabehan* tersebut muncul di tahun 933 Śaka (prasasti Batur Pura Abang A) (Goris 1954, 94).

Kata *pakirakirān* berasal dari kata dasar *kira* atau *kirakira* yang dapat diterjemahkan: ‘pikiran-pikiran yang disimpan’, ‘gagasan’, ‘rencana’, ‘akal’, ‘maksud’, sedangkan *pakirakirān* dapat

diartikan sebagai ‘dewan pejabat-pejabat tinggi’ yang memberikan nasihat, mendiskusikan, atau menyelidiki. Sementara itu, kata *i jro* dapat diartikan sebagai ‘bagian dalam keraton’, dan *makabehan* berarti ‘semua (secara) bersama-sama’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “kira, jro, kabeh”). Artinya, istilah *pakirakirān i jro makabehan* dapat diartikan menjadi ‘dewan pejabat-pejabat tinggi keraton (kerajaan) semuanya’. Astra (1997, 222) mengartikannya menjadi: ‘majelis permusyawaratan paripurna kerajaan’. Anehnya, setelah pemerintahan Dharmmodayana Warmmadewa, yaitu pada masa pemerintahan Sang Ratu Śrī Sang Ājñādewī, istilah *pakirakirān i jro makabehan* tidak digunakan. Raja ini hanya mengeluarkan satu prasasti, yaitu prasasti Sembiran AIII yang berangka tahun 938 Śaka. Pada pemerintahan Ājñādewī, istilah yang digunakan kembali lagi memakai istilah *samohanda senāpati, ser nāyaka, di panglapwan makasupratibaddha* (Goris 1954, 96), sama seperti yang digunakan pada masa pemerintahan Janasādhu Warmmadewa. Namun setelah itu, pada pemerintahan Pāduka Haji Śrī Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa atau yang dikenal dengan nama Raja Marakata, istilah *pakirakirān i jro makabehan* kembali dipakai, dan penggunaannya tetap dipertahankan hingga masa pemerintahan Anak Wungsu. Seperti uraian sebelumnya, lembaga *pakirakirān i jro makabehan* beranggotakan pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang membantu raja ketika membuat keputusan di pucuk pemerintahan. Pada masa pemerintahan Anak Wungsu, kelompok pejabat ini biasanya beranggotakan pejabat yang berasal dari golongan: *senāpati, samgat*, serta pendeta Śiwa dan Buddha (*mpungku śewasogata*) (tabel 2). Kendati raja hadir dalam persidangan yang dilakukan oleh lembaga *pakirakirān i jro makabehan*, keberadaan raja bukan sebagai anggota lembaga tersebut (Astra 2009, 124). Selain membantu raja dalam membuat keputusan pada prasasti, lembaga *pakirakirān i jro makabehan* juga berfungsi untuk menguatkan legitimasi ketetapan raja pada prasasti. Tabel 2 memperlihatkan pejabat-pejabat anggota *pakirakirān i jro makabehan*, tetapi tidak semua pejabat tersebut ada di dalam setiap penetapan prasasti.

3.2 Dunia Konseptual

Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno mengajarkan bahwa terdapat delapan sifat dewa yang tergabung dalam sifat raja, artinya raja harus bertindak sesuai dengan sifat kedelapan dewa tersebut (*aṣṭabrata*) (Boechari 2012c, 217). Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno membandingkan kerajaan Ayodhyā dengan surga Indra, dan Raja Daśaratha dengan Indra di bumi. Indra memang raja para dewa yang bertempat tinggal di puncak Gunung Meru, dan di bawah surganya terdapat surga-surga dari tiga puluh dua dewa utama. Dalam konteks kerajaan-kerajaan Indonesia kuno, Indra diduga bukan dianggap sebagai raja para dewa, melainkan Siwa, seperti yang terjadi di India Selatan (Boechari

2012c, 227). Heine-Geldern (1942, 22) mencatat bahwa kerajaan di Asia Tenggara berkaitan erat dengan gagasan kekuasaan raja yang bersifat adikodrati (*divine kingship*). Keilahian atau sifat adikodrati raja dipahami dengan berbagai cara sesuai dengan agama yang berlaku. Ketika agama Hindu yang berlaku, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa atau keturunan dewa. Kembali pada konsep *aṣṭabrata* dalam Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno, kedelapan dewa penjaga dunia yang tergabung di dalam sifat raja adalah Indra (Indrabrata), Yama (Yamabrata), Sūrya atau Bhaṭāra Rawi (Sūryabrata), Candra (Śaśibrata), Anila (Bāyubrata), Kuwera (Dhanadabrata), Baruṇa (Pāśabrata), dan Agni (Agnibrata)

Tabel 2. Pejabat Anggota *Pakirakirān* i *Jro Makabehan* selama masa pemerintahan Raja Anak Wungśu (Sumber: van der Tuuk dan Brandes 1885; Brandes 1890; van Stein Callenfels 1926; Santosa 1965; Ekawana dan Jaya 1987; Sumerata 2022)

Kelompok Senāpati (Sen.)	Kelompok Samgat (Sgt.)	Mpungku (Mp.) Śewasogata	
		Siwa (Ḍang Ācāryya)	Buddha (Ḍang Upādhyaya/Wandami)
sen. baḷmbunut	sgt. asba	mp. ing kanya/kanyabhawana	mp. ing naḷṅja
sen. ḍinganga	sgt. nāyaka sāksī	mp. ing haritantan/haritantēn	mp. ing bajaśikhara
sen. sarbwa	sgt. tbēsan	mp. ing bañutlu/airtiga/bañutiga	mp. ing dharmmāryya
sen. mañiringin	rakai amali	mp. ing lokeśwara/śrī lokeśwarawijaya	mp. ing dharmmāryya
sen. wṛsantēn	sgt. bonbuluḥ	mp. ing jalatūrtha	mp. ing canggini
sen. pinatih	sgt. tapa haji	mp. ing sūryyamaṇḍala	sgt. mangirengiren
sen. waranaśi	sgt. tija	mp. ing winor/binor	
sen. kuturan	samgat/rakryān hiru	mp. ing dharmmahañar	
sen. ḍaṇḍa	sgt. wurahan	mp. ing garuḍasāra	
	sgt. hulu wungkuk	mp. ing bañugaruḍa	
	sgt. manuratang ājñā i hulu	sgt. makarun	
	sgt. manuratang ājñā i tngah	sgt. juru wadwā	
	sgt. manuratang ājñā i wuntat		
	sgt. cakṣu kārāṇa pura		
	sgt. ādhikārana pura		
	sgt. cakṣu kārāṇa kranta		
	sgt. ādhikārana kranta		
	sgt. mañumbul		
	sgt. paśukganti/pañjinganti		
	sgt. pituha		
	sgt. cakṣu praḥ		

(Boechari 2012a, 532–35). Dewa-dewa yang disebutkan sifatnya di dalam *aŕtabrata* tersebut adalah dewa-dewa Lokapāla yang menjaga delapan arah mata angin, yaitu Indra di timur, Agni di tenggara, Yama di selatan, Sūrya di barat daya, Varuna di barat, Vāyu di barat laut, Kuvera di utara, dan Soma di timur laut (Dowson 1913, 180). Nama Soma sering diasosiasikan dengan bulan, dan beberapa nama lain yang berasosiasi dengan bulan, misalnya: Candra, Indu, dan Śaŕi (Dowson 1913, 302–3), sehingga Candra yang disebutkan dalam Rāmāyaᅇa Jawa Kuno dapat disamakan dengan Soma, dewa Lokapāla penjaga arah timur laut. Bagian *ŕpatha* dari beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungŕu juga menyebutkan beberapa nama dari dewa Lokapāla tersebut yang disebut *catwa ring lokapāla*.

Lebih lanjut, masing-masing sifat kedelapan dewa tersebut adalah sebagai berikut. Sifat Indra adalah mendatangkan hujan, artinya raja selalu mencurahkan anugerah kepada rakyatnya. Sifat Yama adalah menghukum perbuatan jahat dan memberantas semua yang berusaha merintangi ketenteraman dunia, yang berarti menjaga hukum dan ketertiban, serta berlaku adil. Sifat Sūrya adalah menghisap air dengan perlahan-lahan, artinya raja hendaknya menarik pajak tidak dengan tergesa-gesa, dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit sehingga tidak memberatkan rakyat. Sifat Candra adalah menggembirakan seluruh dunia, artinya raja harus bertingkah laku lemah lembut sehingga mampu membawa kebahagiaan kepada rakyat. Sifat Anila atau Bāyu adalah mengintai segala perbuatan, artinya raja harus mengetahui segala sesuatu tentang keadaan rakyat dan segala situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Namun seperti angin yang menjadi sifat Bāyu, gerak-gerik raja tersebut hendaknya juga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sifat Kuwera adalah mengecap kenikmatan, tidak membatasi diri dalam makan dan minum, berpakaian dan mengenakan perhiasan, yang berarti hidup secara mulia dan menjaga kewibawaan. Sifat Baruna adalah memegang senjata dan mengikat semua penjahat, artinya raja harus menangkap semua penjahat. Terakhir, sifat Agni adalah selalu membakar musuh dan ganas terhadap musuh, yang berarti menghancurkan

musuh-musuhnya tanpa ragu-ragu. Kakawin Rāmāyaᅇa Jawa Kuno tersebut menunjukkan bahwa seorang raja memiliki hak untuk menuntut kepatuhan dari rakyatnya, tetapi raja juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kesengsaraan rakyat yang dipimpinnya (Boechari 2012c, 227–28; 2012a, 537–39; Nastiti 2009, 49–50; Santoso 1980, 623–25). Meskipun penggunaan konsep *aŕtabrata* ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam prasasti-prasasti Bali Kuno, kajian terhadap isi prasasti Bali Kuno dapat memberikan sejumlah petunjuk bahwa raja telah menyadari kewajibannya untuk menyejahterakan negara dan rakyatnya (lihat Astra 1997, 230). Representasi *aŕtabrata* tersebut tercermin juga dalam prasasti-prasasti yang terbit selama masa pemerintahan Raja Anak Wungŕu.

3.3 Prasasti sebagai Representasi Raja

Istilah umum yang digunakan untuk kata-kata, suara, atau gambar yang memiliki makna adalah tanda. Tanda-tanda ini mewakili konsep dan hubungan konseptual di antara mereka yang berada di dalam pikiran manusia, dan secara bersama-sama membentuk sistem makna budaya (Hall 1997, 18). Artinya, semua ungkapan bahasa yang ada di dalam prasasti pada dasarnya adalah tanda yang merepresentasikan suatu konsep. Dalam beberapa prasasti Anak Wungŕu, yaitu prasasti Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, dan Klungkung A, terdapat penyebutan ungkapan *sang hyang ājñā haji praŕasti*. Menurut Zoetmulder dan Poedjawijatna (1992, 11), kata *sang hyang* biasanya dipakai untuk dewa atau sesuatu yang dianggap amat mulia sebagai dewa. Kemudian, kata *ājñā* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘perintah’ (Monier-Williams 1899, s.v. “ājñā”), sedangkan kata *haji* berarti ‘raja’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “haji”). Selanjutnya, kata *praŕasti* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘pujian, kemasyhuran, pemujaan’, tetapi dapat juga berarti ‘instruksi, pedoman, peringatan’. Dalam Vikramāᅇkadeva-carita dan Bālarāmāyaᅇa, kata *praŕasti* dapat diartikan juga sebagai ‘dekret’, yaitu ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, atau otoritas lainnya (Monier-Williams 1899, s.v. “praŕastā”). Berdasarkan etimologi tersebut,

prasasti dapat diartikan sebagai suatu dekret yang berisi pujian/pemujaan kepada raja atau yang menggambarkan kemasyhuran seorang raja. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, ungkapan *sang hyang ājñā haji prasasti* dapat dimaknai sebagai perintah raja yang berisi pujian kepada raja atau menggambarkan kemasyhuran raja, dan dianggap memiliki sifat kedewaan, sehingga menjadi representasi dari raja itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa raja merupakan personifikasi dari dewa, sehingga prasasti sebagai representasi dari raja juga memiliki sifat kedewaan. Sebagai contoh, kutipan prasasti Dausa AII (983 Śaka) dapat memberikan konteks atas pemaknaan istilah tersebut: “*mangkana rasanyānugraha pāduka haji, sang hyang ājñā haji prasasti kmitan ikanang dharmma i pacanigayan sapsuk thāni*”, yang berarti: ‘demikian isinya anugerah raja, *sanghyang ājñā haji prasasti* yang dijaga bangunan suci (*dharmma*) di Pacanigayan sewilayah desanya’. Selain *sang hyang ājñā haji prasasti*, ungkapan lain yang kerap muncul dalam prasasti masa pemerintahan Anak Wungsu adalah *sang hyang ujar haji prasasti*. Kendati demikian, makna kedua ungkapan tersebut tidak berbeda jauh, dengan kata “*ujar*” berarti ‘kata-kata, bicara, percakapan’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “*ujar*”).

3.4 Representasi Aṣṭabrata

Sifat-sifat seperti yang diuraikan menurut *aṣṭabrata* dalam Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno tersebut, tercermin juga dalam kebijakan-kebijakan Raja Anak Wungsu. Pada masa pemerintahannya, Raja Anak Wungsu dicatatkan telah beberapa kali memberikan penghargaan kepada rakyatnya, seperti yang dicatatkan dalam prasasti Dawan, Pandak Bandung, dan Kayubih. Prasasti Dawan (975 Śaka) menyebutkan bahwa raja memberikan anugerah berupa status *jātaka* terhadap sawah di Tabaran yang termasuk ke dalam wilayah Desa Lutungan bagi *bhaṭāra* di Āntakuñjarapāda. Kutipan yang menyebutkan peristiwa tersebut adalah: “*anghulu gumula samagrī tumibākēn sarintēnya ri bhaṭāra ringng āntakuñjarapāda, aparṇnaha jātaka ri sira, ahēm sira, makasuruhana ikanang sawah i tabaran*”, yang berarti: ‘semua *hulu* bersama-sama menyerahkan dirinya kepada *bhaṭāra* di

Āntakuñjarapāda agar menempatkan status *jātaka* kepadanya, mereka bersama agar menjadikan sebagai perintah perihal sawah di Tabaran’. Dalam peristiwa tersebut, raja juga memberikan hadiah (*pasēk*) kepada perwakilan desa sebesar 10 *māsa*, seperti dalam kutipan: “*matangnyan wineḥ ta ya pasēk māsa 10 tkap pāduka haji, pinaka dining karāmana narima pasēk sira mpu atmaja, mwang bapa punta, sahāya bapa sarbwa, mañuratang garati*”, yang diterjemahkan: ‘itulah sebabnya diberikanlah *pasēk* sebesar 10 *māsa* oleh raja, sebagai penduduk desa di sini (yang) menerima *pasēk*, beliau Mpu Atmaja, dan Bapa Punta, semua *sahaya bapa, mañuratang* Garati’. Raja Anak Wungsu juga memberikan hadiah kepada *sīma marajang* yang diperuntukkan bagi *bhaṭāra* Āntakuñjarapāda berupa pembelian lahan milik keturunan raja terdahulu yang didharmakan di Senāmukha. Keterangan tersebut disebutkan di dalam prasasti Pandak Bandung (993 Śaka) dengan kutipan: “*umārpanākēn ikang sīma marajang mapakna punpunana sang hyang dharmma ringng āntakuñjarapāda, sambandha dinwal tkap i wka wet sang atīta prabhu lumāḥ ing senāmukha, mangaran dyah jaśa, mwang dyah manali, dyah witta*”. Terjemahannya adalah: ‘menghadiahkan *sīma marajang* agar dijadikan milik *sang hyang dharmma* di Āntakuñjarapāda, sebab dijual oleh keturunan raja terdahulu (yang) berbaring di Senāmukha, bernama Dyah Jaśa, dan Dyah Manali, Dyah Witta’. Pemberian anugerah dilakukan juga kepada Desa Bwah agar menjadi *jātaka* bagi *bhaṭāra* di Airkanakāntarālaya. Keterangan tersebut terdapat di dalam prasasti Kayubih (999 Śaka) yang menyebutkan: “*yan hana yogyanya tibakēn sarintēnya, an pamalaku jataka, manganwaya i ri bhaṭāra ring airkanakāntarālaya*”, yang diterjemahkan: ‘sepatutnya menyerahkan dirinya, untuk meminta (status) *jātaka*, (yang) berhubungan kepada *bhaṭāra* di *airkanakāntarālaya*’. Tindakan-tindakan raja tersebut menggambarkan sifat Indra, yaitu raja selalu memberikan anugerah kepada rakyatnya. Selain prasasti Dawan, Pandak Bandung, dan Kayubih, pada dasarnya, keputusan raja yang dituangkan dalam prasasti dapat dianggap sebagai anugerah. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu kerap menyebutkan: “*sambandha ni panambah*

nikanang karāman ... i lbu ni pāduka haji, anghyang amintānugraha titisan āmbryta”, yang berarti: ‘alasan permohonan penduduk desa ... kepada debu sepatu raja, memohon dengan sangat meminta anugerah tetesan *amṛta*’. Ungkapan tersebut mengibaratkan anugerah yang diberikan oleh raja adalah *amṛta* bagi rakyatnya. Kata *amṛta* berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti ‘abadi’ (Monier-Williams 1899, s.v. “amṛita”), ‘nektar’, atau ‘air suci’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “amṛta”). Kata *amṛta* dapat juga diartikan sebagai ‘air kehidupan’ (Dowson 1913, 12).

Sifat Yama menurut *aṣṭabrata* adalah menjaga hukum dan ketertiban, serta berlaku adil. Upaya penegakan hukum tercermin dalam beberapa ungkapan, antara lain: *matangnyan pinagēhakēn pāduka haji, sarasa ni prasāstinya mūla*”. Kutipan tersebut terdapat dalam prasasti Trunyan AII (971 Śaka) yang diterjemahkan: ‘itulah sebabnya dikokohkan raja, seluruh isi *prasasti*-nya semula’. Prasasti Batunya AII (977 Śaka) juga menyebutkan: “*nguniweḥ sapuriḥnya ring lāgi ta pwa pagēhaknanya*”, yang berarti: ‘dan juga seluruh keadaannya (yang) semula agar menjadikannya kokoh.’. Kemudian, prasasti Munduktemu III (1000 Śaka) menyebutkan: “*mangkana rasa ni panulung paduka haji, irikang karāman i kulutin sablah hulu kayu, kapagēhaknanya dlāha ning dlāha*”, yang diterjemahkan: ‘demikian isi pertolongan raja, kepada *karāman* di Kulutin *sablah hulu kayu*, agar diteguhkannya di masa mendatang’. Sementara itu, sifat raja yang mengupayakan ketertiban dan keadilan ditunjukkan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa siapa pun dilarang mengubah isi prasasti hingga masa mendatang (*tan kawukil-wukila tka ri dlāha ning dlāha*), bahkan oleh raja selanjutnya (*sang anāgata prabhu*) sekalipun, dan ketentuan ini berlaku bagi semua orang dari semua kalangan. Jika seseorang mengganggu (*umulahulāḥ*) atau mempertanyakan kesahihan (*amunarukta*) isi prasasti, ia akan mendapat hukuman. Penyebutan bahwa siapa pun yang mengganggu isi prasasti akan mendapatkan hukuman adalah sebagai berikut: “*brāhmaṇa, kṣatriya, weśya, sudra, hadyan hulun, matuha rarey, laki laki, wadwan, grhasthā, wiku, nayaka, cakṣu parasandiwisa, asingumulahulāḥ anugraha pāduka haji, tka ring dlāha ning dlāha, tasmāt*

kabwataknanya, patyan ta ya kamung hyang”, yang berarti: ‘brahmana, ksatria, wesya, sudra, tuan hamba, tua-muda, laki-laki-perempuan, kepala keluarga, wiku, pejabat *nāyaka*, pejabat pengawas, para petugas *sandhiwiśa*, siapa pun yang mengganggu anugerah raja, hingga di masa mendatang, karena perbuatannya bunuhlah kiranya wahai dewa sekalian’ (prasasti Sawan A, Sembiran AIV, Pandak Bandung, Bila II, Dawan, Dausa AII, dan Pengotan AII).

Keterangan prasasti tersebut menunjukkan bahwa pemberian hukuman berasal dari kekuatan adikodrati melalui *śapatha*, dan seakan-akan menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak datang dari raja. Pemberian hukuman yang berasal dari kekuatan adikodrati ini didasarkan pada penggambaran bahwa Raja Anak Wungśu merupakan penjelmaan dewa (Prihatmoko 2016, 133). Penyebutan *śapatha* ini sekaligus wujud dari sifat Baruna, yaitu menghukum yang jahat. Istilah *śapatha* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘kutukan’ (Monier-Williams 1899, s.v. “śapatha”). *Śapatha* berisi seruan kepada dewa-dewa, kelompok *rākṣasa*, *yakṣa*, *piśāca*, dan sebagainya, termasuk kekuatan gaib, makhluk halus, dan arwah leluhur agar melindungi isi prasasti, serta menghukum kepada siapa pun yang melanggar atau mengganggu ketetapan prasasti (Santiko 1987, 101; Maulana 1992, 191; cf. Nastiti 2022, 84, 92–98). *Śapatha* disebutkan di dalam sebagian besar prasasti Anak Wungśu, yaitu prasasti Bebetin AIII, Dawan, Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Pandak Bandung, Klungkung A, Bila II. Adapun, sifat Agni yang membakar dan menghancurkan musuh-musuhnya tidak terlalu tampak di dalam prasasti-prasasti Raja Anak Wungśu.

Kemudian, sifat Sūrya yang menghisap air dengan perlahan-lahan, dengan kata lain memungut pajak dari masyarakat sedikit demi sedikit agar tidak memberatkan rakyat, tercermin dari sikap raja yang memberikan keringanan pajak kepada rakyatnya. Beberapa prasasti Anak Wungśu yang mencerminkan sifat demikian adalah prasasti Sawan A (980 Śaka) dan Kayubih (999 Śaka). Penyesuaian peraturan di prasasti Sawan A berupa keringanan beban kewajiban bagi penduduk Desa Sukhapura, Harangan,

Gurguran, dan Bangli. Bentuk keringanan itu berupa pengurangan beberapa jenis pajak menjadi setengah dari besaran sebelumnya, misalnya pajak *pamanuk*, *pawalyan*, *pajawa*, *pasang gunung*, *pagajah*, *sawan*, *pgat kulit*, *sabur darah*, dan lain-lain. Sebagai contoh, pajak *pawalyan*, *pajawa*, *pasang gunung*, *pagajah*, *sawan* dikurangi dari sebelumnya 3 *kupang* menjadi 1 *kupang* dan 3 *sāga*, sedangkan pajak *pgat kulit* dan *sabur darah* dikurangi dari sebelumnya 2 *māsāka* dan 2 *kupang* menjadi 1 *māsāka* dan 1 *kupang*. Pengurangan pajak muncul juga dalam prasasti Kayubihī (999 Śaka), yaitu pengurangan untuk pajak *parmāsan*, *panali*, dan *paśrah*. Dalam prasasti ini, pajak *parmāsan*, *panali*, dan *paśrah* semula besarnya 2 *māsāka* dan 2 *kupang*, kemudian dikurangi menjadi 1 *māsāka* dan 1 *kupang*.

Sifat Candra yang berarti bahwa raja selalu berusaha menciptakan kegembiraan di seluruh dunia sehingga mampu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya tercermin dalam ungkapan: “*nityaśa kumingking sakaparipūrṇakna nikanang rāt rinakṣanira*”, yang berarti: ‘senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya’ (prasasti Dawan, Dausa AII, dan Sawan A). Ungkapan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa raja selalu memikirkan kesempurnaan dunia yang dijaganya. Kesempurnaan dunia yang dimaksud dalam ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang tenteram dan sejahtera, atau masyarakat yang bahagia. Sifat Anila atau Bāyu yang dapat dimaknai bahwa raja harus mengetahui segala sesuatu tentang keadaan rakyat dan segala situasi yang terjadi di tengah masyarakat dapat dilihat dari banyaknya jumlah prasasti yang diterbitkan oleh Raja Anak Wungśu. Raja Anak Wungśu mengetahui banyak situasi tidak baik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga banyak mengeluarkan prasasti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Perhatian raja terhadap situasi masyarakat tersebut yang kemudian menjadikan Anak Wungśu menjadi salah satu raja Bali Kuno yang paling banyak menerbitkan prasasti, setelah Raja Jayapangus. Uraian dalam tabel 1 menunjukkan berbagai macam situasi yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian

diselesaikan oleh Raja Anak Wungśu melalui penerbitan prasasti.

Selanjutnya, sifat Kuwera dalam diri raja digambarkan melalui ungkapan yang menempatkan kedudukan raja di posisi amat mulia. Ungkapan tersebut berbunyi: “*anambah i lbū ni pāduka haji*”, yang berarti: ‘menyembah kepada debu sepatu raja’. Artinya, posisi raja begitu teramat mulia, bahkan seseorang pun sepertinya kurang pantas jika menghadap langsung kepada raja saat membuat permohonan, sehingga selayaknya hanya cukup dengan menghadap dan menyembah kepada debu sepatu milik seorang raja. Demikian uraian dalam prasasti sebagai representasi sifat *aṣṭabrata* dari Raja Anak Wungśu. Sifat *aṣṭabrata* sekaligus menjadi gambaran yang mewakili konsep raja ideal.

3.5 Representasi Sifat Kedewaan

Kerajaan-kerajaan Indonesia Kuno, termasuk kerajaan Bali Kuno, kerap mengasosiasikan sosok raja sebagai penjelmaan dewa. Dalam konteks kerajaan Bali Kuno, Raja Anak Wungśu merupakan raja Bali Kuno pertama yang mengasosiasikan dirinya dengan dewa (Hardiati 2010, 365), berdasarkan keterangan pada prasasti Dawan (975 Śaka). Ungkapan yang muncul dalam prasasti Dawan adalah: “*tēkyēn pwa pāduka haji, karunātmā sāksāt niran harimūrti, nityasa nira kumingking sakaparipūrṇakna nikanang rāt rinakṣanira*”, yang berarti: “lebih-lebih raja, berjiwa welas asih sungguh-sungguh perwujudan Hari, senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya”. Nama Hari umumnya merujuk kepada Dewa Wisnu (Dowson 1913, 117). Kendati Raja Anak Wungśu mengidentikkan dirinya dengan Dewa Wisnu, hal tersebut bukan berarti ia adalah penganut Waisnawa. Kemungkinan, pernyataan Raja Anak Wungśu sebagai inkarnasi Dewa Hari berhubungan dengan sifat-sifat Dewa Wisnu sebagai pelindung dunia (Tejowasono 2003, 178–79). Penyebutan Raja Anak Wungśu sebagai perwujudan Hari hanya sekali saja. Sisanya, dalam prasasti Sawan A (980 Śaka), Dausa AII (983 Śaka), dan Pandak Bandung (993 Śaka), ia disebutkan berbeda, yaitu sebagai *dharmamūrti*, yang berarti perwujudan Dharma. Secara lengkap, penyebutannya

pada beberapa prasasti Anak Wungśu dapat dijelaskan sebagai berikut. Prasasti Sawan A menyebutkan: “*gö(ng) kārūnya pwa pinaka swabhāwa pāduka haji, sāksāt dharmmamūrti nityaśa kumingking sakaparipūrṇakna nikanang rāt rinakṣanira*”, yang berarti: ‘besar karunia sebagai sifat raja, sungguh-sungguh perwujudan Dharma senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya’. Prasasti Dausa AII menyebutkan: “*saksat dharmamurti atmantya bhaṭāra dewatā angalap i liring kulit kaki, nityaśa kumingking sakaparipūrṇakna nikanang balidwīpamaṇḍala*”, terjemahannya: ‘sungguh-sungguh perwujudan Dharma jiwanya *bhaṭāra dewata* yang mengambil lirikan leluhurnya, senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan *maṇḍala* Pulau Bali’. Prasasti Pandak Bandung menyebutkan: “*kunang sangkā ri kadharmeṣṭan pāduka haji sāksāt dharmmamūrti nityaśa kumingking sakaparipūrṇakna sang hyang sarbwa dharma, mwang subhikṣa nikanang rāt rinakṣanira*”, terjemahannya: ‘adapun oleh karena keluhuran budi raja, sungguh-sungguh perwujudan Dharma senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan *sang hyang* Dharma seluruhnya, dan kemakmuran dunia yang dijaganya’. Nama lain Dharma adalah Yama, yaitu dewa keadilan (Wiguna 2009, 29).

Penyebutan Raja Anak Wungśu sebagai perwujudan Dharma atau Yama juga menguatkan representasi sifat *aṣṭabrata* dari diri Raja Anak Wungśu. Penyebutan Yama juga muncul beberapa kali di bagian *śapatha* dari prasasti-prasasti Raja Anak Wungśu, yaitu di prasasti Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, dan Bila II. Bagian *śapatha* prasasti-prasasti tersebut menyebutkan *catwa ring lokapāla*, yaitu empat dewa Lokapāla. Keempat dewa tersebut adalah Yama, Bāruṇa, Kuwera, Bāsawa. Bāsawa (Vāsava) adalah nama lain bagi Indra dalam kelompok empat dewa Lokapāla (*caturlokapāla*) ini (Santiko 1987, 117). Artinya, *catwa ring lokapāla* yang terdapat di *śapatha* itu hanya menyebutkan dewa-dewa penjaga di empat arah mata angin saja, yaitu selatan, barat, utara, dan timur. Berdasarkan prasasti-prasasti yang dikeluarkannya, Raja Anak Wungśu dianggap sebagai perwujudan Dharma (Yama) dan Hari (Wisnu), sehingga ia dianggap

sebagai raja yang menjaga kesempurnaan dan kemakmuran dunia, selalu berpegang teguh kepada hukum, dan berlaku adil.

3.6 Gelar Raja sebagai Representasi

Heine-Geldern (1942, 21) berpendapat bahwa peran kosmik atau keilahian seorang raja mendapatkan penekanan khusus dalam ritual penobatannya atau upacara *abhiṣeka*. *Abhiṣeka* merupakan konsekrasi atau peresmian, biasanya sebagai raja, dengan memercikkan air atau mengurapi (Monier-Williams 1899, s.v. “*abhisheka*”; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “*abhiṣeka*”). Seorang raja dianggap sebagai inkarnasi dari dewa tertentu, kadang-kadang terlihat jelas dari nama *abhiṣeka* mereka, dan nama *abhiṣeka* tersebut tercantum di dalam gelarnya (Boechari 2012b, 219). Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, penyebutan gelar raja Anak Wungśu berbeda dengan pendahulunya. Gelar Raja Anak Wungśu secara lengkap adalah *pāduka haji anak wungśunira kalih bhatari sang lumah i burwan, mwang bhaṭāra dewata sang lumah i bañu wka*, yang bila diartikan menjadi: ‘*pāduka haji* anak bungsunya (beliau) berdua Bhatari yang berbaring (*didharmakan*) di Burwan, dan Bhatara yang berbaring di Banyu Wka’.

Goris (1957, 19–20) berpendapat bahwa *bhaṭāri* yang *didharmakan* di Burwan adalah Guṇapriyadharmmapatni, sedangkan *bhaṭāra* yang *didharmakan* di Bañu Wka adalah Udayana (Dharmmodayana Warmmadewa). Penafsiran tersebut didasarkan pada uraian sebagai berikut. Selain Anak Wungśu, kedua raja istri-suami tersebut juga memiliki anak yang bernama Dharmmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa atau yang dikenal dengan nama Marakata. Marakata merupakan raja Bali Kuno yang memerintah sebelum Anak Wungśu, yaitu dari tahun 944 Śaka – 947 Śaka. Hubungan Marakata sebagai anak dari Guṇapriya dan Udayana tersebut dapat dilihat dalam prasasti Tengkulak A (945 Śaka), berdasarkan kutipan: “*mājar an mūla kinon haji dewatā sang lumah ring air wka sajalu strī, manganwaya ri sang hyang katyāgan ing pakrisan mangaran ring amarāwatī, ..., mangkai pwan mengēt ikanang karāman i songan tāmahan sapañambahan, an*

wka haji dewatā sang lumāḥ ring air wka sajalu strī, prasiddhā kumaliliring kulit kaki” (Ekawana, Atmodjo, dan Suhadi 1990, 8–9). Terjemahan kutipan tersebut adalah: ‘memberi tahu bahwa (penduduk desa) semula disuruh raja dewata yang berbaring di Air Wka suami istri, mengenai pertapaan di Pakrisan bernama Amarāwati, ..., sekarang ini mengingatlah penduduk Desa Songan Tambahan sewilayah pemujaan, bahwa (*paduka haji*) anak raja dewata yang berbaring di Air Wka suami istri, memang sungguh mewarisi (garis keturunan) leluhurnya’. Kutipan tersebut memang tidak menyebutkan *bhaṭāri* yang *didharmakan* di Burwan, tetapi justru menyebutkan bahwa raja yang *didharmakan* di Air Wka adalah raja suami-istri (*sajalu strī*). Sebelumnya, penyebutan raja suami-istri (*haji sajalu strī*) muncul dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Guṇapriya dan Udayana, seperti prasasti Bwahan A dan Tamblingan Pura Endek AIII (Goris 1954, 83; Suantika dkk. 2009, 13). Selain itu, menurut Goris (1957, 21), gelar lengkap Raja Marakata, yaitu Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa, menunjukkan adanya hubungan silsilah dengan Dharmawangśa Tguh (saudara laki-laki Guṇapriyadharmapatni) dan Pu Siṇḍok. Hubungan silsilah tersebut dilihat berdasarkan penggunaan unsur nama Dharmawangśa (dari Dharmawangśa Tguh) dan Uttunggadewa (dari Pu Siṇḍok) (lihat juga Hardiati 2010, 197–99). Prasasti Tengkulak A menyebutkan bahwa Marakata merupakan anak dari raja suami-istri yang *didharmakan* di Air Wka, sedangkan prasasti-prasasti Anak Wungśu juga menyatakan bahwa ia merupakan anak bungsu dari raja yang *didharmakan* di Burwan dan Bañu Wka. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Marakata dan Anak Wungśu memang memiliki hubungan keluarga dengan Guṇapriya dan Udayana.

Kendati sama-sama memiliki hubungan keluarga, penggunaan nama gelar Anak Wungśu dan Marakata benar-benar berbeda. Gelar Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa dapat diartikan sebagai berikut. *Dharma* berarti ‘hukum, kebenaran, atau Dewa Dharma’; *wangśa* berarti ‘keturunan’; *wardhana* berarti ‘memperkuat, mengokohkan’; *marakata* berarti ‘permata’; *pangkaja*

berarti ‘teratai’; *sthāna* berarti ‘tempat’; dan *uttungga* berarti ‘tertinggi’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “dharma, wañśa, wardhana, marakata, pañkaja, sthāna II, uttuṅga”). Dengan kata lain, nama Dharmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa dapat diartikan: ‘ia yang mengokohkan keturunan Dharma, bagaikan bunga teratai yang cemerlang seperti permata, yang berada di tempat tertinggi para dewa’. Selain penggunaan unsur nama yang memperlihatkan hubungan silsilah dan legitimasi, gelar Marakata juga merepresentasikan idealisme yang ingin dicapai oleh seorang raja.

Kembali pada pendapat Heine-Geldern yang mengatakan bahwa keilahian seorang raja mendapat penekanan khusus dalam ritual penobatannya, hal itu berarti sifat kedewaan, sifat adikodrati, atau sifat-sifat ideal lainnya merupakan unsur yang penting di dalam nama *abhiṣeka* seorang raja. Gelar Raja Anak Wungśu sama sekali tidak mengandung sifat-sifat ideal tersebut, bahkan nama Anak Wungśu pun belum tentu merujuk kepada nama raja tersebut. Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, penggunaan sufiks *-nira* berfungsi sebagai kata ganti penentu kepemilikan, dan dapat disepadankan dengan akhiran “-nya” dalam bahasa Indonesia (Mardiarsito dan Kridalaksana 1984, 45; cf. Zoetmulder dan Poedjawijatna 1992, 18), sehingga kata *anak wungśunira* yang diartikan ‘anak bungsunya’ memungkinkan untuk dimaknai bukan sebagai nama. Asumsi tersebut belum tentu benar, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hal lain yang menjadi perhatian adalah penarikan hubungan silsilah yang berbeda antara Marakata dan Anak Wungśu. Dalam gelarnya, Marakata menarik hubungan silsilahnya ke Dharmawangśa Tguh, bahkan hingga Pu Siṇḍok. Selain itu, prasasti Tengkulak A juga menyatakan bahwa Marakata adalah anak dari Guṇapriya dan Udayana, yang pada saat itu keduanya telah mangkat. Adapun, Anak Wungśu hanya menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari Guṇapriya dan Udayana yang dinyatakan di dalam gelarnya, tetapi ia tidak menarik silsilahnya lebih jauh lagi. Anak Wungśu juga tidak memakai gelar *wangśa* dari garis keturunan kedua orang tuanya, dan ia pun tidak membuat *wangśa*-nya sendiri. Kendati gelar raja Anak

Wungsu tidak merepresentasikan sifat ideal apa pun, representasinya sebagai seorang raja yang ideal dimunculkan di bagian-bagian lain dari isi prasastinya. Selain itu, representasi tersebut juga dibangun dari kebijakannya berupa: penyelesaian berbagai macam masalah yang terjadi di berbagai wilayah kerajaannya, pemberian anugerah kepada rakyatnya, dan perbaikan hukum di berbagai tempat melalui penetapan ulang prasasti dari raja-raja terdahulu.

Prasasti sebagai representasi raja mengandung pesan dan makna di dalamnya, artinya terdapat proses *encoding* dalam produksi makna di dalam prasasti. Pada sisi yang berbeda, pesan dan makna yang terkandung di dalam prasasti diuraikan dan diterjemahkan oleh masyarakat menjadi sesuatu yang dimaknai, artinya terdapat proses *decoding*. Pertukaran pesan melalui proses *encoding-decoding* tersebut belum tentu menghasilkan pemaknaan yang simetris di antara pembuat dan penerima pesan. Kajian dalam artikel ini tidak berusaha untuk mengungkapkan bagaimana proses *decoding* di masyarakat terjadi, dan apakah terjadi distorsi dalam pertukaran komunikasi itu. Namun, hal yang dapat menjadi perhatian adalah Raja Anak Wungsu merupakan raja Bali Kuno dengan masa pemerintahan paling lama berdasarkan data prasastinya, yaitu sekitar 29 tahun (971 Śaka – 1000 Śaka). Terbuka kemungkinan bahwa proses pertukaran pesan atau komunikasi yang efektif antara raja dengan masyarakat, salah satunya melalui prasasti, turut berpengaruh terhadap kelanggengan kekuasaan Raja Anak Wungsu.

4. Kesimpulan

Representasi adalah proses saat pelaku budaya menggunakan bahasa (dalam artian yang luas, yaitu sistem penanda apa pun) untuk memproduksi makna. Makna kemudian dibangun melalui suatu sistem untuk mewakili atau merepresentasikan suatu konsep. Proses produksi makna ini juga dilakukan oleh raja-raja Indonesia Kuno, termasuk raja-raja Bali Kuno. Dalam konteks kerajaan Bali Kuno, Raja Anak Wungsu memiliki penggambaran yang berbeda sebagai seorang raja jika dibandingkan dengan raja-raja pendahulunya, misalnya dalam hal penggunaan

nama gelar dan pengasosiasian diri dengan dewa. Kendati demikian, penggambaran yang berbeda tersebut tetap membangun makna dirinya sebagai representasi raja ideal. Gelar yang digunakan oleh Raja Anak Wungsu tidak memberi gambaran apa pun mengenai sifat ideal yang menjadi cita-cita seorang raja. Meskipun demikian, representasi raja ideal tersebut dibangun berdasarkan konsep *aṣṭabrata* dan pengasosiasian diri dengan dewa, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raja Anak Wungsu dalam menerapkan *aṣṭabrata* di dalam kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: penyelesaian berbagai masalah yang tersebar di seluruh wilayah kerajaannya yang tercermin dari banyaknya ketetapan prasasti yang dibuat, pemberian-pemberian anugerah kepada rakyatnya, dan perbaikan di bidang hukum melalui penetapan ulang prasasti dari raja-raja yang terdahulu.

Daftar Pustaka

- Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- . 2002. "Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat pada Masa Gunapriyadharmapatni-Dharmodayana Warmadewa." *Humaniora* XIV (2): 127–36.
- . 2008. "Birokrasi Pemerintahan pada Masa Bali Kuno: Hubungan antara Pusat dan Daerah." Dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX, Kediri 23-28 Juli 2002*, disunting oleh Edi Sedyawati, 737–49. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- . 2009. "Epigrafi, Historiografi, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Multi-kultural." Dalam *Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra dan Budaya*, 111–35. Denpasar: Udayana University Press.
- Atmodjo, M.M. Sukarto K. 1992. "A Newly Discovered Pillar Inscription of Sri Kesariwarma-(Dewa) at Malat Gede." Dalam *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*, disunting oleh

- Nies A. Subagus, 150–56. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Bacchi, Carol, dan Jennifer Bonham. 2014. “Reclaiming Discursive Practices as an Analytic Focus: Political Implications.” *Foucault Studies*, no. 17: 173-192.
- Boechari. 2012a. “Aṣṭabrata.” Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 531–40. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2012b. “Epigraphic Evidence on Kingship in Ancient Java.” Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 217–23. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2012c. “Some Aspects of Traditional Society.” Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, disunting oleh Susanti Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 225–36. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2012d. “Tafsiran Atas Prasasti Wanua Tengah III.” Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 467–71. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brandes, J.L.A. 1890. “De Koperen Platen van Sembiran (Boeleleng, Bali), Oorkonden in het Oud-Javaansch en het Oud-Balinesesch.” *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* XXXIII: 16–56.
- Casparis, J.G. de. 1956. *Prasasti Indonesia II*. Bandung: Masa Baru.
- Damais, Louis-Charles. 1951. “Études Balinaises. I. La colonnette de Sanur.” *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* XLIV: 121–28.
- . 1952. “Études d'Épigraphie Indonésienne III: Liste des Principales Inscriptions Datées de l'Indonésie.” *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* 46 (1): 1–105.
- . 1955. “Études d'Épigraphie Indonésienne: IV. Discussion de La Date des Inscriptions.” *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient* 47 (1): 7–290.
- . 1959. “Notices Bibliographiques: Ouvrages d'Études Indonésiennes.” *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* 49 (2): 679–702.
- . 1960. “Études Balinaises. V. La Date de Quelques Nouvelles Chartes Balinaises.” *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* 50: 153–60.
- Dowson, John. 1913. *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature*. Fifth Edit. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd.
- Ekawana, I Gusti Putu, M.M. Sukarto K. Atmodjo, dan Machi Suhadi. 1990. “Laporan Penelitian Epigrafi Bali Tahap II.” Dalam *Berita Penelitian Arkeologi*. Vol. 41. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ekawana, I Gusti Putu, dan I Made Jaya. 1987. “Prasasti Pura Penataran Pucangan Desa Kayubihi Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.” Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar.
- Foucault, Michel. 1980a. “Prison Talk.” Dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, disunting oleh Colin Gordon, 37–54. New York: Pantheon Books.
- . 1980b. “Two Lectures.” Dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, disunting oleh Colin Gordon, 78–108. New York: Pantheon Books.
- Goris, Roelof. 1948. *Sedjarah Bali Kuna*. Singaradja.
- . 1954. *Prasasti Bali*. 2 Volumes. Bandung: N.V. Masa Baru.
- . 1957. “Dinasti Warmadewa dan Dharmawangca di Pulau Bali.” *Bahasa dan Budaya* V (3): 18–31.
- . 1965. *Ancient History of Bali*. Denpasar: Udayana University.
- Hall, Stuart. 1980. “Encoding/Decoding.” Dalam *Culture, Media, Language*, disunting oleh Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, dan Paul Willis, 117–27. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies.

- . 1997. “The Work of Representation.” Dalam *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, disunting oleh Stuart Hall, 13–64. London-California-New Delhi: SAGE Publications.
- Hardiati, Endang Sri. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno*. Disunting oleh Endang Sri Hardiati, Hasan Djafar, Soeroso, P.E.J. Ferdinandus, dan Titi Surti Nastiti. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Heine-Geldern, Robert. 1942. “Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia.” *The Far Eastern Quarterly* 2 (1): 15–30.
- Mardiarsito, L., dan Harimurti Kridalaksana. 1984. *Struktur Bahasa Jawa Kuna*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Maulana, Ratnaesih. 1992. “Śiva dalam Berbagai Wujud: Suatu Analisis Ikonografi di Jawa Masa Hindu-Buddha.” Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Monier-Williams, Monier. 1899. *A Sanskrit-English Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Nastiti, Titi Surti. 2009. “Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII--XV Masehi).” Disertasi, Universitas Indonesia.
- . 2022. “Durgā dan Manifestasinya dalam Prasasti.” Dalam *Membaca Durga: Bunga Rampai Tulisan Pemikiran Tentang Durga*, disunting oleh Seno Joko Suyono, 82–103. Depok: Penerbit Borobudur Writers and Cultural Society (BWCF).
- Poerbatjaraka. 1926. “De Dateering van het Oud-Javaansch Rāmāyaṇa.” Dalam *Gedenkschrift: Uitgegeven ter Gelegenheid van het 75-Jarig Bestaan*, 265–72. ’sGravenhage: KITLV van Nederlandsch-Indië.
- Prihatmoko, Hedwi. 2016. “Kajian Epigrafis Prasasti Babahan.” *Forum Arkeologi* 29 (3): 117–36.
- Prihatmoko, Hedwi, Gendro Keling, I Gusti Made Suarbhawa, I Wayan Sumerata, dan I Putu Yuda Haribuana. 2020. “Penelitian Kewilayahan Masa Bali Kuno di Tabanan Berdasarkan Sumber Prasasti.” Laporan Penelitian Arkeologi. Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Provinsi Bali.
- Ramadhana, Ken Bimo. 2016. “Legitimasi Kekuasaan Raja Majapahit Berdasarkan Namabhiseka.” Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
- Santiko, Hariani. 1987. “Kedudukan Bhatārī Durgā di Jawa pada Abad X–XV Masehi.” Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Santosa, Ida Bagus. 1965. “Prasasti-prasasti Raja Anak Wungsu di Bali.” Skripsi, Universitas Udayana.
- Santoso, Soewito. 1980. *Ramayana Kakawin*. 3 Volumes. New Delhi: Sharada Rani.
- Stein Callenfels, P.V. van. 1926. “Epigraphia Balica I.” *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* LXVI.
- Stutterheim, W.F. 1929. *Oudheden van Bali: Tekst en Platen*. Singaradja: Kirtya Liefrinck-Van Der Tuuk.
- . 1934. “A Newly Discovered Pre-Nagari Inscription on Bali.” *Acta Orientalia* XII: 126–32.
- Suantika, I Wayan, I Gusti Made Suarbhawa, I Nyoman Sunarya, A.A. Gde Bagus, dan A.A. Gede Oka Astawa. 2009. *Prasasti Tamblingan*. Buleleng: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Sumerata, I Wayan. 2022. “Penelitian Prasasti Temuan Baru di Munduktemu dan Penempatannya dalam Historiografi Bali Kuno.” Laporan Penelitian. Denpasar: Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Sunarya, I Nyoman, I Wayan Srijaya, I Wayan Gede Wisnu, I Wayan Sumerata, I Putu Yuda Haribuana, Hedwi Prihatmoko, dan Ida Ayu Gede Megasuari Indria. 2019. “Penelitian Hidro-Arkeologi DAS Pakrisan-Petanu, Kabupaten Gianyar: Kajian Terhadap Pola Penempatan Bangunan Suci.” Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.
- Tejowasono, Ninny Susanti. 2003. “Airlangga: Raja Pembaharu di Jawa pada Abad Ke-11 Masehi.” Disertasi, Depok: Universitas Indonesia.
- Tuuk, H.N. van der, dan J.L.A. Brandes. 1885. “Transcriptie van vier Oud-Javaansche Oorkonden op Koper, Gevonden op het Eiland Bali.” *Tijdschrift voor Indische*

- Taal-, Land- en Volkenkunde* XXX: 603–24.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara. 2009. *Hak-Hak Atas Tanah pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zoetmulder, P.J., dan I.R. Poedjawijatna. 1992. *Bahasa Parwa: Tata Bahasa Jawa Kuna I Bentuk Kata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 1993. *Bahasa Parwa: Tata Bahasa Jawa Kuna II Bentuk Kalimat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zoetmulder, P.J., dan S.O. Robson. 2006. *Kamus Jawa Kuna - Indonesia*. Cetakan Kelima. Penerjemah Darusuprta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: KITLV dan PT Gramedia Pustaka Utama.